

Pengaruh Keadilan Distributif Kompensasi dan Keadilan Prosedural Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada SKPD Kabupaten Ngada

Hermanus Reo, Sabulon Sayang, Lavianus Loy Tunga
e-mail: hermanreo1970@gmail.com

Program Studi Akuntansi, FE, Universitas Flores

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan distributif kompensasi dan keadilan procedural kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada SKPD Kabupaten Ngada. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini (1) keadilan distributif berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada SKPD Kabupaten Ngada. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi keadilan distributif sebesar 0,192 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,251 > 2,010$) dan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. (2) Keadilan procedural berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi keadilan procedural sebesar 0,407 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,876 > 2,010$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Besar pengaruh variabel keadilan distributif dan keadilan procedural terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 44,6%. Sedangkan sisanya 53,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Kata kunci: distributif kompensasi, keadilan,, keadilan procedural kompensasi, kecurangan akuntansi

ABSTRACT: *This study aims to determine the effect of distributive justice compensation and procedural justice of compensation against the tendency of accounting fraud at SKPD Ngada district. The method used in this research is descriptive quantitative. The results of this study (1) justice distributive effect on accounting fraud at SKPD Ngada Regency. This is evidenced by the value of the regression coefficient justice distributive with value 0,192 with $t_{count} > t_{table}$ ($3,251 > 2,010$) and a significant level of $0,002 < 0,05$. (2) Justice procedural effect on accounting fraud. This is evidenced by the value of the regression coefficient of procedural justice by 0,407 with $t_{count} > t_{table}$ ($4,876 > 2,010$) and the level of significant $0,000 < 0,05$. The great influence of the variables of distributive justice and procedural justice against the tendency of accounting fraud amounted to 44,6%. While the rest the rest 53,4% is explained by other variables outside the model.*

Keyword: *accoutnung fraud, justice, distributive compensation, procedural justice of compensation*

PENDAHULUAN

Standard the Institute of Auditors mendefinisikan *fraud* sebagai segala perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa atau mencegah pembayaran atas kerugian atau untuk menjain keuntungan atau manfaat pribadi dan bisnis (Priantara, 2013). Sebagai konsep kejahatan yang bersifat askriptis, *fraud* dapat terjadi di berbagai sector baik sector oublik, social, maupun korporasi. *Fraud* merupakan konsep ekjahatan yang memiliki cakupan luas. *Fraud* dalam literatur akuntansi dan *Fraud* auditing diartikan sebagai penipuan atau kecurangan di bidang keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia menjelaskan kecurangan sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva.

Berdasarkan indeks yang dipublikasikan okeh TI (*Tranparency International*) menunjukkan bahwa Indonesia masih digolongkan sebagainegara dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi di dunia. CPI (Corruption Perseption Index) Indonesia dari 2010 – 2014 berkisar 2,8 sampai 3,4 (0 dipersepsikan sangat korup dan 10 dipersepsikan sangat bersih). Sejak diberlakukannya UU No. 32 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, 291 dari 524 kepala daerah terlibat masalah korupsi (Indo Pos, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tersebar secara vertical dari pusat ke daerah.

Menurut Moorhead, G & Griffin, R.W (2013) berkenan dengan kompensasi, organisasi harus memperhatikan dua aspek, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Keadilan distributif merujuk pada kesesuaian kompendasi yang akan didistribusikan kepada pegawai. Sedangkan keadilan prosedural merujuk pada cara – cara yang dilakkan oleh organisasi untuk menentukan besaran kompensasi yang akan didistribusikan. Walaupun demikian, efektivitas keadilan distributif maupun keadilan prosedural dalam menekan kecenderungan untuk

berbuat curang yang dilakukan pegawai masih diperdebatkan hingga saat ini.

Peneltiian yang dilakukan Pramudita (2013), Najah (2013), dan Zulkarnain (2013), menemukan bahwa keadilan distributif terbukti efektif menurunkan kecenderungan pegawai untuk berbuat curang. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012) dan Faisal (2013) menemukan hal yang sebaliknya. Sama halnya dengan keadilan distributif, efektivitas keadilan prosedural dalam rangka menurunkan kecenderungan untuk ebrbuat curang oleh pegawai masih diperdebatkan. Penelitian Najah (2013) menemukan bahwa imolementasi keadilan prosedural pada pegawai Dinas Provinsi D,I. Yogyakarta dapag menurunkan kecenderungan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai negeri. Hasil sebaliknya ditemukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012).

Alasan penelitian yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada, karena berdasarkan temuan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat beberapa kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Ngada diantaranya, kasus penyalahgunaan dana bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu sebesar ratusan juta (poskupang.com, 2014). Berdasarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas laporan keuangan pemerintahan Kabu[at]en Ngada tahun anggaran 2018. Opini yang diberikan BPK adalah wajar tanpa pengecualian, namun dalam catatan khusus LHP Pemda Ngada tahun 2018 terdapat beberapa temuan yang belum sesuai standar, diantaranya penyajian aset lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan satndar, pelaporan aset tetap pada Pemkab Ngada belum tertib. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Vianney Siwe selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada terdapat kasus terbaru ditahun 2019, yaitu kasus korupsi penggunaan dana rutin sebesar 200 juta

yang dilakukan oleh bendahara Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ngada. Dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngada.

Peneliti memilih lokasi ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian keadilan distribusi dan keadilan prosedural kompensasi terhadap kecenderungan keuangan akuntansi pada SKPD Kabupaten Ngada.

LANDASAN TEORI

Menurut Robbins dan Coukter dalam (Chasanah, 2015) menyatakan bahwa keadilan distributif merupakan persepsi keadilan hasil dalam jumlah dan pemberian penghargaan yang diterima antar individu atau karyawan. Menurut Greenberg dalam (Kharie & Darwis, 2020) mengemukakan keadilan distributif merupakan penilaian yang berkaitan dengan kewajaran hasil atau kewajaran pengalokasian atau dengan kata lain keadilan distributif mengacu pada kewajaran yang diterima. Hasil dapat didistribusikan berdasarkan kesetaraan, kebutuhan atau kontribusi karyawan dapat menentukan keadilan distributif dengan membandingkan pada orang lain. Dalam keadilan distributif sudut pandang buruh mengenai keadilan didapat dari persepsi individu tentang perbandingan antara hasil yang didapatkan dengan hasil yang diperoleh pekerja atau buruh lain. Situasi yang dihadapi oleh buruh juga dibandingkan dengan situasi yang dihadapi oleh buruh lainnya. Sehingga setiap buruh menginginkan hasil yang sesuai dengan keinginannya dan menguntungkan dirinya. Keadilan distributif yang dimaksudkan tidak hanya berasosiasi dengan pemberian, tetapi juga meliputi pembagian, penyaluran, penempatan, dan pertukaran.

Indikator keahlian menurut Niehoff & Moorman dalam (Yudhian et al., 2020), yaitu:

1. Jadwal Kerja

Jadwal kerja meliputi berapa lama karyawan bekerja, waktu mulai dan selesai dalam pekerjaan dan waktu untuk istirahat.

2. Tingkat Gaji

Tingkat gaji yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan karyawan.

3. Beban Kerja

Karyawan dapat menilai sendiri beban pekerjaannya yang dihadapi saat ini berat atau ringan.

4. Penghargaan yang Didapatkan

Pemberian penghargaan pada karyawan harus sesuai dengan prestasi yang karyawan capai.

5. Tanggung Jawab Pekerjaan

Setiap karyawan mempunyai tanggung jawab pekerjaan masing-masing, tanggung jawab pekerjaan hendaknya diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan karyawan dalam bekerja.

Keadilan prosedural adalah persepsi adil yang ditunjukkan oleh karyawan yang dinilai dengan perilaku perusahaan dalam melaksanakan prosedur yang telah diterapkannya. Oleh karena itu, apabila perusahaan konsisten dalam melaksanakan prosedur yang telah diterapkan, maka karyawan akan merasa diperlakukan secara adil,

Menurut Suifan et al dalam (Rahmawati, 2020), yaitu:

1. Kendali proses

Menunjukkan penilaian mengenai kesempatan yang diberikan untuk mengungkapkan pandangan selama peraturan diterapkan

2. Kendali keputusan

Menunjukkan penilaian mengenai kesempatan yang diberikan dan diwakili oleh persatuan pegawai untuk ikut mengawasi penerapan peraturan.

3. Konsistensi

Menunjukkan penilaian mengenai konsistensi penerapan peraturan

4. Bebas prasangka

Menunjukkan penilaian mengenai tidak adanya diskriminasi perlakuan

5. Akurasi informasi.

Menunjukkan penilaian mengenai keakuratan informasi yang digunakan

- untuk membuat keputusan
6. Mampu koreksi
Menunjukkan penilaian mengenai proses banding atau mekanisme lain yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan.
 7. Etika dan moral
Menunjukkan penilaian mengenai norma pedoman profesional dalam penerapan peraturan.

Menurut Tuannakota dalam (Warsidi et al., 2018), *fraud* ialah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. Dapat disimpulkan kecurangan akuntansi atau *fraud* merupakan suatu tindakan pelanggaran yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang – orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau secara langsung merugikan pihak lain.

METODE PENELITIAN

Peneelitan ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ngada. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah pegawai pada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngada yang berjumlah 3.751 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 52 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik

analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS.

PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menguji pengaruh keadilan distributif dan keadilan prosedural terhadap kecurangan akuntansi dilakukan analisis regresi linear berganda. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Tabel 4.1
Regresi Linear Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sign t
Konstanta	3,181		
Keadilan Distributif	0,192	3,251	0,002
Keadilan Prosedural	0,407	4,876	0,000

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda yang ditunjukkan tabel diatas, maka persamaan garis regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 3,181 + 0,192X_1 + 0,407X_2 + 0,05$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 3,181 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural) dalam keadaan tetap maka variabel Kecurangan Akuntansi akan terjadi sebesar 3,181.
2. Koefisien regresi variabel Keadilan Distributif (X_1) sebesar 0,192, berarti jika variabel Keadilan Distributif meningkat sebesar satu satuan maka variabel Kecurangan Akuntansi meningkat sebesar 0,192.
3. Koefisien regresi variabel Keadilan Prosedural (X_2) sebesar 0,407, berarti jika variabel Keadilan Prosedural meningkat sebesar satu satuan maka variabel Kecurangan Akuntansi meningkat sebesar 0,407.

Uji Hipotesis

Uji T

Uji Statistik t digunakan untuk

mengetahui apakah pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen signifikan atau tidak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji t ini berfungsi untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian. Hasil uji t terhadap variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Uji Statistik t

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sign t
Konstanta	3,181		
Keadilan Distributif	0,192	3,251	0,002
Keadilan Prosedural	0,407	4,876	0,000
t Tabel		2,010	

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel Keadilan Distributif sebesar 0,192 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,251 > 2,010$) dan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Keadilan Distributif berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi. Artinya meningkatnya Keadilan Distributif, maka Kecurangan Akuntansi pada SKPD Kabupaten Ngada juga ikut meningkat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikbal dan Syamsuri Rahim (2019) yang menyatakan bahwa Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedur berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi.

2. Hipotesis 2

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel Keadilan Prosedural sebesar 0,407 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,876 >$

$2,010$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Keadilan Prosedural berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi. Artinya meningkatnya Keadilan Prosedural, maka Kecurangan Akuntansi pada SKPD Kabupaten Ngada juga ikut meningkat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari Aprilliyanti (2018) yang menyatakan bahwa Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedur berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi.

Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Imam Ghazali, 2016). Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Uji Statistik F

F _{hitung}	F _{table}	Signifikan
19,691	3,19	0,000

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 19,691 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan F tabel sebesar 3,19. Dengan demikian F_{hitung} lebih besar F_{tabel} ($19,691 > 3,19$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel Keadilan Prosedural dan Keadilan Distributif berpengaruh terhadap variabel Kecurangan Akuntansi.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji Koefisien Determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Koefisien Determinasi

R	R Square
0,668	0,446

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021.

Nilai R^2 sebesar 0,446 atau 46,6% yang berarti bahwa variabel Kecurangan Akuntansi dipengaruhi oleh variabel Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural sebesar 0,446%. Sedangkan sisanya 53,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keadilan Distributif berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi pada SKPD Kabupaten Ngada. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi Keadilan Distributif sebesar 0,192 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,251 > 2,010$) dan tingkat signifikan $0,002 < 0,05$. Artinya meningkatnya Keadilan Distributif, maka Kecurangan Akuntansi pada SKPD Kabupaten Ngada juga ikut meningkat.
2. Keadilan Prosedural berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi Keadilan Prosedural sebesar 0,407 dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,876 > 2,010$) dan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa Keadilan Prosedural berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi. Artinya meningkatnya Keadilan Prosedural, maka Kecurangan Akuntansi pada SKPD Kabupaten Ngada juga ikut meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada agar memperhatikan faktor Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural, karena berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi baik secara parsial maupun simultan.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang memungkinkan memiliki pengaruh terhadap Kecurangan Akuntansi, misalnya variabel *Locus of Control*.
3. Peneliti selanjutnya dianjurkan menggunakan metode lain dalam pengambilan data seperti metode wawancara, agar memperluas kemungkinan jawaban yang diberikan oleh responden.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Daftar Pustaka

- Aprilliyanti, W. (2018). *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Asimetri Informasi, Budaya Etis Organisasi Dan Keadilan Prosedural Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Pemerintah Kota Kendari*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Chasanah, I. R. (2015). *Pengaruh Keadilan Prosedural dan Keadilan Distributif Terhadap Komitmen Organisasi Di PT. SAI Apparel Industries Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Faisal, M. (2013). Analisis fraud di sektor pemerintahan kabupaten kudu. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Ikbal, I., & Rahim, S. (2019). Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Kecurangan Akuntansi dengan Pertimbangan Etis sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(1), 215–222.
- Imam Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (VIII)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kharie, S. M., & Darwis, H. (2020). Moderasi Sistem Pengendalian Internal pada Hubungan antara Kompetensi Auditor Internal dan Keadilan Organisasional Terhadap Pencegahan Fraud. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(1), 85–108.
- Moorhead, G., & Griffin, R. W. (2013).

- Perilaku Organisasi: Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi. *Jakarta: Salemba Empat.*
- Najah, A. F. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud: persepsi pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Pramudita, A. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Persepsi Pegawai pada Dinas Se-Kota Salatiga)*. Universitas Negeri Semarang.
- Priantara, D. (2013). *Fraud auditing & investigation*. *Jakarta: Mitra Wacana Media.*
- Pristiyanti, I. R. (2012). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Rahmawati, I. A. (2020). *Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Terhadap Komitmen Afektif Melalui Power Distance Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada PT PLN UP3 Magelang)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Warsidi, W., Maghfiroh, S., & Nanda, L. (2018). The effect of professional skepticism, client pressure, auditor experience, and audit regulation on audit fraud (Empirical study in Headquarter Office of Badan Pemeriksa Keuangan RI). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(1).
- Yudhian, E. F., DN, S. W., & Indiyastuti, D. L. (2020). Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Turnover Intention dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 27(2), 123–134.
- Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud pada dinas Kota Surakarta. *Accounting Analysis Journal*, 2(2).